BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan melalui:
   a. Proses komunikasi diantara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan *stakeholders* terkait dilakukan dengan cara pelatihan. Kelompok masyarakat nelayan pada kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan ini, yaitu kelompok pengolah/pelaku usaha, kelompok budidaya, dan kelompok garam. Pihak ataupun sumber yang memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk berkomunikasi adalah Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) melalui pengurus di lokasi, dengan membawa nilai inovasi dan teknologi pada proses pemberdayaan ini, yang dimaksudkan agar masyarakat mau dan mampu memecahkan masalah (*problem solving*) dan agar masyarakat berkelompok terdukung pemberdayaan. Selanjutnya terdapat efek pada proses komunikasi ini, antara lain sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi pelaku usaha, peningkatan pemahaman mengenai standart

pangan, dan meningkatnya kewirausahaan kelompok pengolah di desa Weru.

b. Kegiatan advokasi/pendampingan dilakukan pengurus KIMBis terhadap masyarakat dengan berbagai kegiatan, meliputi penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan, pengurusan sertifikasi PIRT bagi pelaku usaha, peningkatan kualitas usaha pengolahan garam tradisional, transfer teknologi pembuatan pakan buatan dan pemijahan lele, fasilitasi permohonan kebutuhan teknologi, dan pembukaan akses terhadap peluang pasar berupa pameran dan pemasaran keliling.

c. Beroperasinya KIMBis di Kabupaten Lamongan sejauh ini belum maksimal hanya sebatas pelatihan untuk masyarakat.

d. Keberadaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan KIMBis dengan pelatihan dan pendampingan hal yang didapatkan masyarakat adalah orientasi kewirausahaan meningkat dan kondisi kualitas SDM berkembang cukup baik.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan:

a. Faktor internal yang mendukung adalah adanya keuntungan dari peran seorang Manajer klinik sebagai penyuluh dan ketua UPT Dinas KP Kecamatan. Sedangkan faktor penghambat internal adalah kurangnya intensitas komunikasi diantara masyarakat dengan stakeholder, dan adanya *tool* penunjang operasionalisasi KIMBis berupa petunjuk

teknis kegiatan dianggap pelaksana lokasi kurang sesuai dengan lokasi atau realitas di lapangan.

b. Faktor eksternal yang mendukung adalah adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan yang cukup besar diantaranya meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan, keterlibatan dan komitmen penyuluh, dan dukungan pemerintah Desa Weru sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat adalah adanya resistensi dan respon dari masyarakat sasaran, dan belum adanya regulasi lanjutan ataupun kebijakan yang menguatkan KIMBis di Kabupaten Lamongan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan, maka diperlukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan pemahaman konsep dan komitmen stakeholder yang terlibat pada kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan melalui rapat-rapat rutin dan koordinasi dengan pihak inisiator terhadap konsistensi, relevansi, dan kepastian keberlanjutan kegiatan.
2. Meningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, yaitu dengan cara pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk pengurus dan observasi studi banding di lokasi pemberdayaan

yang telah berhasil dengan maksud agar kinerja KIMBis menjadi lebih baik dan bisa terdukung pemberdayaan.

3. Mengefektifkan komunikasi antar stakeholder untuk pelatihan dan pendampingan, sosialisasi KIMBis kepada masyarakat baik formal maupun *in*-formal memanfaatkan agenda pertemuan yang dilakukan masyarakat perikanan, dan tindak lanjut dengan pendampingan agar masyarakat menjalankan proses pemberdayaan yang di sosialisasikan, sehingga capaian dapat efektif.
4. Perlu adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan yang menguatkan KIMBis di Kabupaten Lamongan dari pemerintah daerah yang disahkan Bupati melalui advokasi pengurus lokasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan agar perannya akan semakin jelas dan dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan, sehingga dapat mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan di bidang perikanan dan kelautan.
5. Perlu mengembangkan kemitraan antar stakeholder yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat nelayan agar dapat merespon permasalahan masyarakat nelayan lebih cepat, terdukung adanya pertukaran sumber daya (*resources exchange*) kelautan secara kolektif, sekaligus mencarikan pemecahan permasalahan tersebut.
6. Mengembangkan percontohan yang dijadikan model pemberdayaan untuk masyarakat nelayan, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pendapatannya.